

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN USAHA *FOOD COURT* DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI
KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan diajukan oleh

Abdul Malik Habir Imran
E051191076



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PEMBERDAYAAN USAHA *FOOD COURT* DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN JENEPONTO

OLEH

**ABDUL MALIK HABIR IMRAN
E051191076**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024





Optimized using
trial version
www.balesio.com



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Malik Habir Imran

NIM : E051191076

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul:

"PEMBERDAYAAN USAHA FOOD COURT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN JENEPONTO"

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Abdul Malik Habir Imran



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Proposal Penelitian dengan judul “Pemberdayaan Usaha *Food Court* Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Jeneponto”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S. IP) Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasannya. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada;

1. Orang tua saya Ayahanda Imran Sam dan Zaituni yang telah mendidik, mendorong, dan mendoakan saya khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi ini.

2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis



untuk menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Phill Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang baik
4. Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku pembimbing I Sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis selama berkuliah yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Ashar Prawitno, S.IP. M.Si. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai anggota tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penulis..
7. Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si, selaku anggota tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penulis.
8. Terima Kasih Penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu serta seluruh dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama berkuliah.



9. Seluruh Staf Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Terima Kasih Kepada Informan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jeneponto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan informasi melalui wawancara.
11. Terima kasih kepada Pengelola Goedang Kapas yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti serta para pemilik *counter* di Goedang Kapas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan informasi melalui wawancara.
12. Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Keluarga, Kerabat Yang Telah Memberikan Dukungan Moril Kepada Penulis.
13. Teman-Teman KKN Gel. 108 Kelurahan Padang Pandang, Kabupaten Gowa terima kasih atas segala canda tawanya selama KKN.
14. Teman-Teman Angkatan 2019 Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-sersatu.

Makassar, 30 Mei 2024

Penulis

Abdul Malik Habir Imran



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian Umkm.....	13
2.2 Pengertian Food Court.....	16
2.3 Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	17
2.4 Peran Pemerintah Daerah.....	21
2.5 Pengertian Dampak.....	24
2.6 Keaslian Penelitian.....	26
2.7 Kerangka Berpikir.....	29
2.7.1 Usaha Foodcourt.....	29
2.7.2 Peran Pemerintah Daerah.....	30
2.7.3 Dampak Positif Dan Negatif.....	31
2.7.4 Pembangunan Ekonomi Daerah Jeneponto.....	31
METODE PENELITIAN.....	33



3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Fokus Penelitian.....	34
3.4 Jenis Dan Sumber Data Yang Digunakan.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Jeneponto....	37
4.1.2 Lokasi Dinas Koperasi UKM Jeneponto.....	39
4.1.3 Visi Dan Misi.....	39
4.1.4 Struktur Organisasi.....	40
4.1.5 Gambaran Umum Goedang Kapas.....	41
4.1.6 Lokasi Goedang Kapas.....	44
4.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM Foodcourt Di Kabupaten Jeneponto.....	44
4.2.1 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator.....	44
4.2.2 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator.....	53
4.2.2.1 Matriks.....	55
4.2.3 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Katalisator.....	70
4.3 Dampak Pemberdayaan UMKM Food Court Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Jeneponto.....	77
4.3.1 Dampak Positif.....	77
4.3.2 Dampak Negatif.....	84
BAB V PENUTUP.....	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
DAFTAR LAMPIRAN.....	101



DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	Halaman
Tabel 1.1 Peningkatan UMKM Di Jeneponto.....	8
Tabel 2.7 Kerangka Berfikir.....	32
Tabel 4.1.5 Nama Counter/Kedai.....	43
Tabel 4.3.1 Data Jumlah Pengunjung.....	82
Tabel 4.3.2 Data Jumlah Pajak PBB PTPN.....	89



ABSTRACT

ABDUL MALIK HABIR IMRAN, Principal Number E051191076. Government Science Study Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a Thesis with the Title “Empowerment of Food Court Businesses in Regional Economic Development in Jeneponto Regency” Under the Guidance of **Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si. And Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.**

This study aims to determine how the Empowerment of Food Court Businesses in Regional Economic Development in Jeneponto Regency. This research method is qualitative research to reveal data descriptively. This research has been carried out at the Jeneponto Cooperative and UKM Office, from September to October 2023. The data collection techniques used, namely interviews, observation, documentation, and literature studies, then the data is analyzed through data reduction, data presentation, and data verification.

The results showed that the role of local governments in empowering Food Court-type MSMEs can be seen from three (3) aspects, namely facilitators, regulators and catalysts, in terms of facilitators, the role as a facilitator has not been carried out properly, it can be seen from coaching activities in the form of trainings that have not been carried out by the agency to add insight and skills to Food Court business actors to apply technology by marketing their MSME products online, regulator, it is concluded that it has not played a role because some of the programs made are constrained to run because the owners or business actors in Goedang kapas have not been recorded. With the excitement of MSMEs, the economy of the community will also grow, catalyst, it is concluded that the government has not played a role well enough, because in collecting data, conveying information or providing direction to Food Court business actors in Goedang kapas has never been done so that business actors have not received assistance and there is no business development. so that it becomes a Fast Moving Enterprise, not yet implemented properly.

The positive impact of the Food Court MSME Empowerment is felt by the community, especially for business actors in Goedang Kapas with the presence of the Goedang Kapas Food Court, which has had a positive impact on business actors. The negative impact is that the impact of Food Court type MSMEs, especially in Goedang Kapas in economic development in Jeneponto Regency does not have a significant influence.

Keywords: Empowerment, Government Role, MSMEs, Food Court, Impact



ABSTRAK

ABDUL MALIK HABIR IMRAN, Nomor Pokok E051191076. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi Dengan Judul “Pemberdayaan Usaha Food Court Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Jeneponto” Di Bawah Bimbingan **Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si. Dan Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Usaha Food Court Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif untuk mengungkapkan data secara deskriptif. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kantor Dinas koperasi dan UKM Jeneponto, pada bulan September hingga Oktober tahun 2023. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM jenis *Food Court* dilihat dari tiga (3) aspek, yakni fasilitator, regulator dan katalisator, dari segi fasilitator peran sebagai fasilitator belum dijalankan dengan baik, bisa dilihat dari kegiatan pembinaan dalam bentuk pelatihan–pelatihan yang belum dilakukan oleh dinas untuk menambah wawasan dan keterampilan para pelaku usaha *Food Court* untuk mengaplikasikan teknologi dengan memasarkan produk UMKM nya secara *online*, regulator, disimpulkan belum berperan dikarenakan beberapa program yang dibuat ini ada yang terkendala untuk dijalankan dikarenakan belum terdatanya para pemilik atau para pelaku usaha yang ada di Goedang kapas. Dengan bergairahnya UMKM maka ekonomi kerakyatan pun ikut tumbuh, katalisator, disimpulkan bahwa pemerintah belum bereperan cukup baik, karena dalam melakukan pendataan, menyampaikan informasi atau memberikan arahan kepada pelaku usaha *Food Court* yang ada di Goedang kapas belum pernah dilakukan sehingga para pelaku usaha belum mendapatkan bantuan dan pemberdayaan usahanya itu tidak ada. sehingga menjadi Fast Moving Enterprise, belum terlaksana dengan baik.

Dampak positif dari Pemberdayaan UMKM *Food Court* ini dirasakan oleh masyarakat terutama bagi para pelaku usaha yang ada di Goedang kapas dengan hadirnya Food Court Goedang Kapas ini telah memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha. Dampak negatifnya yaitu bahwa dampak UMKM jenis *Food Court* khususnya di Goedang Kapas dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Jeneponto tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.



ici: Pemberdayaan, Peran Pemerintah, UMKM, *Food Court*, Dampak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi masa depan. Perkembangan tersebut mengarah pada perubahan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor bisnis sebagai ukuran keberhasilan pemerintah. Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan dan ketimpangan yang terkonsentrasi dan tidak merata dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi adalah rapuh. Oleh karena itu, pembangunan harus melibatkan peran masyarakat sebagai pelaku utama dan sebagai otoritas yang mengetahui pembangunan.¹

Salah satu indikator pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan isu yang mendesak di negara ini, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kekayaan rakyat. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa serta kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, seluruh lapisan



¹Jur Sarfia, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, UMKM Sebagai Pilar un Ekonomi Bangsa, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Universitas gelang, Vol 4, No.1, 2019, hlm 138.

masyarakat dan pemerintahan harus terlibat dalam prakarsa pembangunan daerah, menggunakan segala sumber daya yang ada serta merencanakan dan mengembangkan perekonomian daerah. Pujiono (2013).²

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan nasional meliputi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang diselenggarakan oleh negara dan masyarakat. Pelaku utama dalam pembangunan adalah masyarakat, sedangkan negara bertugas memimpin dan melindungi serta menciptakan iklim yang aman dan damai yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Peranan masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Posisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional menjadi penting dan strategis. Kondisi ini sangat mungkin karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia karena industrinya banyak dan ada di semua sektor perekonomian. potensi lapangan kerja yang besar, dan pangsa UMKM dalam pembentukan produk nasional bruto (PDB) sangat dominan. Alasan lain adalah bahwa mikro dan UMKM memiliki keunggulan di sektor padat sumber daya dan tenaga kerja,



Jur Sarfia, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, UMKM Sebagai Pilar un Ekonomi Bangsa, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Universitas Jelang, Vol 4, No.1, 2019, hlm 138.

terutama di perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan agribisnis. Perusahaan menengah memiliki keunggulan dalam nilai tambah di sektor perhotelan, keuangan, persewaan, jasa bisnis dan kehutanan. Perusahaan besar memiliki keunggulan di industri manufaktur, listrik, gas, komunikasi dan pertambangan. Sehingga hal ini membuktikan bahwa UMKM dan perusahaan besar saling melengkapi dan membutuhkan, padahal UMKM lebih dominan dalam hal mempertahankan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan nasional.³

Salah satu prioritas terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah pembangunan dari segi ekonomi. Pembangunan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dalam jangka panjang (Menajang, 2019). Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawab pemerintah kota. Berdasarkan UU Pemda Provinsi No. 23 Tahun 2014, dimana pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat besar dalam mengelola urusan pemerintahan, juga terkait dengan pembangunan ekonomi.

Salah satu peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kreativitas dan



Jur Sarfia, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, UMKM Sebagai Pilar un Ekonomi Bangsa, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Universitas jelang, Vol 4, No.1, 2019, hlm 138.

inovasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. (Sumadi, 2021).⁴

Perkembangan UMKM di Indonesia yang diukur dari efisiensi UMKM secara keseluruhan sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Porsi UMKM dalam PDB bervariasi, mencerminkan tingkat pertumbuhan output UMKM yang cenderung berfluktuasi dan masih lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan besar. Implikasi dari kondisi ini adalah adanya perbedaan tingkat produktivitas antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar. Tingkat produktivitas UMKM Indonesia tahun 2010-2013 berdasarkan jumlah unit usaha dan karyawan memang meningkat, namun perkembangan jumlah unit usaha berbeda. Secara keseluruhan, UMKM akan menyusut sebesar 2 persen antara tahun 2010 dan 2013. Pada saat yang sama, produktivitas tenaga kerja UMKM meningkat rata-rata 6 persen antara tahun 2010 dan 2013, sedangkan produktivitas tenaga kerja perusahaan besar meningkat rata-rata 8 persen antara tahun 2010 dan 2013.⁵

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah, pemerintah kota harus

⁴ Monica Dwipi Salam, Ananta Prathama, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM, Jurnal Kebijakan Publik, Prodi Administrasi Publik, FISIP, s Pembangunan Nasional "Veteran", Vol 13, No.2, 2022, hal 137.
⁵ ria Hamzah, Devi Agustien, Pengaruh perkembangan usaha mikro, kecil, dan terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia, Jurnal Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung, Vol 8, No.2, 129.



memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan industri. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi nyata kepada UMKM dengan mempertahankan produk yang sudah ada di saat banyak produk impor masuk ke pasar domestik. UMKM yang tumbuh kuat di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah karena merupakan salah satu kunci peningkatan perekonomian daerah.⁶

Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Salah satunya adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan entitas ekonomi yang dapat dimiliki oleh individu atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nalini, 2021). Keberadaan sektor UMKM dapat menciptakan berbagai keuntungan bagi daerah, seperti Memperkenalkan wirausaha baru sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang tentunya menyerap tenaga kerja (Karimah et al., 2021).⁷

UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian daerah yang harus dapat memperoleh dukungan, perlindungan, dan pengembangan pada titik-titik kontak dengan komunitas bisnis Masyarakat. Melibatkan pemerintah

⁶ Christofer Ondang, Frans Singkoh, Neni Kumayas, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Dinas Koperasi Dan Ukm), Fakultas Ilmu Social Dan Politik, Universitas Sam Vol 3, No.3, 2019, Hal 2.



Dwipi Salam, Ananta Prathama, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM, Jurnal Kebijakan Publik, Prodi Administrasi Publik, FISIP, s Pembangunan Nasional "Veteran", Vol 13, No.2, 2022, hal 138.

daerah dalam mempengaruhi Dinas Koperasi dan UKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.⁸

Mengingat berbagai manfaat yang dibawa UMKM ke daerah, peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan UMKM harus dilakukan agar UMKM di daerah dapat berkembang dengan baik dan berpartisipasi. Pemerintah daerah harus bertindak dan berpartisipasi langsung dalam pengembangan UMKM (Budiyanto & Effendy, 2020). Sehingga bukan hanya sekedar perhatian saja yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dari UMKM melalui berbagai kegiatan pembangunan.⁹

Berdasarkan perkembangan zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah, termasuk kesejahteraan masyarakat. bagi daerah, khususnya sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu cara untuk mengenalkan produk kreatif daerah dan memberikan peluang usaha kepada pelaku usaha daerah. meningkatkan pendapatan per kapita secara signifikan dan meningkatkan perekonomian daerah sehingga usaha

⁸ Christofer Ondang, Frans Singkoh, Neni Kumayas, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan Ukm), Fakultas Ilmu Social Dan Politik, Universitas Sam Vol 3, No.3, 2019, Hal 2.

⁹ Dwipi Salam, Ananta Prathama, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM, Jurnal Kebijakan Publik, Prodi Administrasi Publik, FISIP, s Pembangunan Nasional "Veteran", Vol 13, No.2, 2022, hal 138.



mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam pertumbuhan ekonomi daerah Jeneponto.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini berkembang di Kabupaten Jeneponto sudah banyak dan berbagai macam mulai dari restoran, bengkel, cuci mobil atau motor, *café*, *barbershop* dan lain sebagainya. Menurut data yang dipublikasikan Dinas Koperasi dan UKM, hingga tahun 2021, UKM meningkat pesat dari tahun ke tahun. Seperti yang tertera pada tabel berikut.¹⁰



to.go.id, Perkuat potensi UMKM, Pemkab Jeneponto Bangun Sinergi Dengan Perusahaan, 27 Juli 2022, <https://jenepontokab.go.id/berita-show/perkuat-ukm-pemkab-jeneponto-bangun-sinergi-dengan-berbagai-perusahaan>, 14 Februari 2023].

Tabel 1.1 Peningkatan UMKM Di Jeneponto

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH UMKM			
			2018	2019	2020	2021 *)
1	BINAMU	13	4.052	4.216	8.772	9.629
2	TURATEA	11	1.331	1.489	2.760	4.422
3	RUMBIA	12	298	417	672	1.291
4	KELARA	10	1.472	1.554	1.103	1.242
5	TAROWANG	8	1.163	1.205	1.231	2.062
6	BATANG	6	1.019	1.104	1.560	3.803
7	ARUNGKEKE	7	316	372	1.006	2.971
8	BONTORAMBA	12	581	868	1.816	3.516
9	TAMALATEA	12	2.285	2.339	4.213	7.241
10	BANGKALA	14	851	1.103	538	4.040
11	BANGKALA BARAT	8	450	519	293	5.179
JUMLAH		113	13.818	15.186	24.024	45.396

Sumber: koperasiukm.jenepontokab.go.id (2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdiri dari beberapa sektor usaha yang salah satunya ialah sektor usaha kuliner. Usaha kuliner ataupun disebut juga bisnis minuman dan makanan termasuk usaha yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan usaha kuliner ataupun bisnis minuman



an ini tercatat sebagai usaha dengan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ini hanya di Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia dan

selalu berkembang. Hal ini diberikan bukti dengan semakin banyak kedai ataupun outlet yang melakukan penawaran produk minuman dan makanan dalam berbagai bentuk. Usaha kuliner juga termasuk usaha yang tidak mengenal krisis karena melakukan penawaran produk yang menjadi kebutuhan pokok manusia sebagai sumber tenaga ataupun energi untuk bertahan hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari¹¹

Tempat usaha kuliner kian banyak bermunculan. Usaha-usaha tersebut muncul dengan berbagai konsep, mulai konsep tradisional seperti angkringan, warung makan sederhana hingga modern seperti coffee shop, restoran, dan lain sebagainya. Salah satu tempat usaha modern yang banyak dikunjungi ialah restoran. Restoran termasuk usaha kuliner yang melakukan penawaran beraneka macam variasi menu mulai dari minuman dan makanan, Salah satu jenis restoran yang berkembang saat ini di Kabupaten Jenepono adalah usaha *Food Court*, atau Pusat kuliner ini merupakan tempat makan minum dengan banyak stand makanan maupun minuman. *Food Court* adalah suatu tempat makan dengan *counter* atau kedai yang terdiri dari berbagai penjual makanan serta disediakan suatu area umum untuk *self-serve dining*.¹²

Di Jenepono UMKM *Food Court* sangat diminati karena kurangnya tempat untuk bersantai dan *Food Court* ini menjadi pilihan masyarakat



¹¹ Larasati, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan ffee Jatim Expo di Surabaya," Jurnal Gema Aktualita 2, No. 2, (2013): 7
¹² Sano, "Management Food and Beverage Service Hotel" (Jakarta: PT. Gramedia Umum, 2000), 17

kabupaten Jeneponto untuk menghabiskan waktu Bersama temanteman maupun keluarga. Usaha *Food Court* yang ada di Jeneponto sudah berkembang pesat total ada 6, dan terletak diberbagai kecamatan yang berbeda, yaitu Titik tengah, Jeneponto point, Goedang kapas, Titik nol Jeneponto berada di kecamatan Rumbia, Boyong transit station berada di kecamatan Tamalatea, Dan juga di Alun-Alun Kota Jeneponto yaitu Lapangan passamatturukang (PASTUR). Dengan banyaknya usaha *Food Court* sejenis yang ada di Kabupaten Jeneponto membuat daya saing antar pelaku usaha semakin sempit.

Jenis Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) *Food Court* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto. Dan juga diharapkan agar kabupaten Jeneponto dalam hal perekonomian daerah bisa menjadi daerah atau kabupaten yang maju dan tidak dikatakan lagi sebagai kabupaten termiskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis data kemiskinan dan ketimpangan di setiap daerah di Sulsel pada 26 Desember 2022. Jeneponto berada di peringkat kedua sebagai daerah termiskin se sulawesi selatan. Persentase penduduk miskin di Jeneponto mencapai 13,73 persen.¹³

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kabupaten Jeneponto merupakan sektor ekonomi yang cukup penting bagi perekonomian daerah.



com, 9 daerah termiskin sesulawesi selatan, 27 desember 2022, w.detik.com/sulsel/bisnis/d-6483473/9-daerah-termiskin-di-sulawesi-selatan-ini-#:~:text=Kabupaten%20Jeneponto,km%C2%B2%20yang%20meliputi%2011%20an. [Diakses, 16 April 2022]

Tentunya dengan hadirnya UMKM *Food Court* ini dapat memberikan dampak positif bagi roda perekonomian daerah. Tentu pemerintah sebagai fasilitator harus hadir dalam pengembangan UMKM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberdayaan UMKM *Food Court* terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto dan mengetahui korelasinya. Pertumbuhan UMKM *Food Court* berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto. Dan peneliti akan meneliti UMKM *Food Court* jenis makanan.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM *Food Court* Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana dampak UMKM *Food Court* terhadap pembangunan ekonomi daerah Di Kabupaten Jeneponto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM *Food Court* Di Kabupaten Jeneponto



-halim, Pengaruh Perumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap ran Ekonomi Kabupaten Mamuju, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, STIE idiyah Mamuju, Vol 1, No.2, 2020, Hal 160.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh *UMKM Food Court* terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Jeneponto

1.4 Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu;

1. Untuk pemerintahan daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam pengembangan atau pemberdayaan *UMKM Food Court* dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten Jeneponto.
2. Untuk akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya pemberdayaan *UMKM Food Court* terhadap suatu daerah, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya *UMKM Food Court* dan menjadikan masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan *UMKM*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda dalam literatur masing-masing tergantung pada otoritas atau lembaga yang berbeda dan bahkan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UKM didefinisikan sebagai berikut:¹⁵

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik swasta dan/atau pedagang tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan dalam Undang-undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi yang memiliki, menguasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. untuk usaha kecil dalam pengertian undang-undang.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dikuasai oleh orang perseorangan atau badan usaha yang



Nur Sarfia, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, UMKM Sebagai Pilar un Ekonomi Bangsa, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Universitas Jelang, Vol 4, No.1, 2019, hlm 162.

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau ditanamkan baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha kecil atau besar. jumlah akhir dari hasil bersih atau omset tahunan menurut undang-undang.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:



Nur Sarfia, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, UMKM Sebagai Pilar un Ekonomi Bangsa, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Universitas Jelang, Vol 4, No.1, 2019, hlm 163.

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹⁷

Departemen Perindustrian dan Perbankan, Indonesia (1990) mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya, yaitu badan usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp600.000.000. Sementara itu, Departemen Perdagangan mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha dengan modal kerja kurang dari Rp25.000.000. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perusahaan industri kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan 5-19 orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan tidak lebih dari 5 orang. Secara umum, pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa dari bahan baku primer, dengan memanfaatkan sumber daya alam, bakat, dan kesenian tradisional daerah.



Nur Sarfia, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, UMKM Sebagai Pilar un Ekonomi Bangsa, Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Universitas Jelang, Vol 4, No.1, 2019, hlm 163.

Beberapa ciri-ciri UMKM adalah bahan baku mudah diperolehnya, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor, beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat serta melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan.¹⁸

2.2 Pengertian *Food Court*

Food Court merupakan sarana tempat untuk membeli makanan dan minuman yang terdiri dari berbagai *stand* atau *counter* yang menawarkan jenis kuliner yang bervariasi. Istilah *Food Court* dalam bahasa Indonesia disebut pujasera alias Pusat Jajanan Serba Ada. *Food Court* menjadi solusi bagi pelaku usaha UMKM bidang kuliner yang semakin banyak jumlahnya, untuk berbisnis secara *online* dan juga *offline*. Umumnya berbentuk area makan terbuka dan bersifat informal. Biasanya *Food Court* berada di mall, kantin sekolah, kantin kampus, dan kantin kantor. Seiring dari tahun ke tahun usaha *Food Court* banyak diminati semua orang.



-Halim, Pengaruh Perumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Perekonomian Kabupaten Mamuju, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, STIE Bina Widayah Mamuju, Vol 1, No.2, 2020, Hal 162-163.

Food Court merujuk pada suatu tempat dimana orang-orang mampir untuk membeli suatu makanan atau minuman. *Food Court* adalah fasilitas umum yang dibuat untuk menjadi alternatif restoran. *Food Court* memiliki berbagai pilihan menu makanan dan minuman sehingga pembeli bisa memilih untuk memakanan dan minum yang diinginkan. Selain itu, tidak hanya digunakan sebagai tempat makan dan minum *Food Court* juga digunakan sebagai tempat untuk bersantai atau sekedar hanya menghabiskan waktu.

2.3 Pengertian Pembangunan ekonomi

Banyak orang selalu keliru dalam menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebenarnya kedua istilah itu mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, mereka digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut: *economic development is growth*



ange-yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi
cuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi.

Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sector pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembagian pendapatan. Perbedaan penting lainnya adalah: dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita terus-menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita.¹⁹

Pembangunan ekonomi bisa diartikan menjadi sebuah proses yang berlangsung terus menerus dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada buat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu membutuhkan asal daya yang cukup besar. Sumber daya tadi dapat mencakup; sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal serta asal daya kelembagaan (institusional). berbagai sumber daya ekonomi tadi dapat disediakan oleh alam secara alamiah dan bisa memberikan penghidupan bagi rakyat yang mengelola sumber daya ekonomi yang ada.

Ketersediaan sumber daya ekonomi yang melimpah dapat menjadi pendorong bagi suatu negara buat dapat menaikkan intensitas gunan negara untuk mencapai kemakmuran serta kemandirian



¹⁹ Sukirno, 2019, Makroekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada, hal 423.

ekonomi suatu negara. Selain asal daya tadi, pembangunan ekonomi pula membutuhkan kemajuan pada dominasi teknologi. Teknologi bisa berperan dalam mempercepat proses pencapaian output sehingga ketercapaian kesejahteraan masyarakat bisa segera terealisasi pada pembangunan ekonomi.²⁰

Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Studi tentang pembangunan ekonomi dikenal sebagai ekonomi pembangunan).

Dalam pengertian ringkas diatas dapat didefinisikan sebagai:

1. Pembangunan ekonomi, sebagai proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara/daerah dalam rangka memakmurkan warganegara/penduduk daerah setempat.
2. Ekonomi pembangunan, sebagai bidang studi yang mengkaji pembangunan ekonomi di suatu negara/daerah.

Kata pembangunan ekonomi nampaknya sampai saat ini belum ada satu definisi tunggal yang menyerap seluruh unsur penting yang wajib dicakup. Barangkali, karena selain pembangunan ekonomi itu sendiri menjadi sesuatu yang dimanik (proses serta tujuannya), juga orientasi kebijakan yang dimaksud pada dalamnya selalu variatif serta konotatif. mirip yang



stea Frisdiantara, Ak., MM.CA., Dr. Imam Mukhklis, SE., M. Si, 2016, Ekonomi janan, Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, Hal 3-4.

pernah ditelaah Witjaksono (2006) wacana gambaran Dewan Pembangunan Ekonomi Internasional (*IEDC: International Economic Development Council, 2006*), hingga saat ini tak ada definisi tunggal yang mewadahi semua aneka definisi perihal pembangunan ekonomi, namun mampu dipilah berdasarkan deskripsi tujuan dan proses yang terkandung didalam pembangunan ekonomi itu sendiri.²¹

Tujuan pembangunan ekonomi adalah penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan, serta perbaikan kualitas hidup. Proses pembangunan ekonomi ialah buat mempengaruhi pertumbuhan dan penataan balik suatu ekonomi pada rangka menaikkan kemakmuran ekonomi suatu masyarakat.

Dalam pengertian paling luas, pembangunan ekonomi mengarah pada kebijakan dan program berikut:

- a. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dalam arti luas yang mencakup pengendalian inflasi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- b. Kebijakan dan program yang bertujuan memberikan/menyediakan layanan kepada publik yang mencakup pembangunan jalan raya, pengelolaan taman, dan layanan medis bagi golongan kurang mampu.
- c. Kebijakan dan program yang secara eksplisit ditujukan pada perbaikan iklim usaha melalui upaya-upaya khusus, keuangan usaha,



Witjaksono, Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan dalam Konteks Studi Pembangunan, Jurnal, Fakultas Ekonomi, Universitas Balesio, No. 1, No. 1. 2009.

pemasaran, pembangunan kawasan hunian, retensi dan ekspansi usaha, alih teknologi, pengembangan properti/estat dan lain sebagainya.²²

2.4 Peran Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya pada system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah merupakan lembaga ataupun instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya buat melakukan pengembangan pada UMKM di Kabupaten Jenepono. lembaga ini ialah Dinas Koperasi UKM Kabupaten Jenepono yang berperan sebagai pemeran primer pada pengembangan UMKM di Kabupaten Jenepono.²³

Menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator:



ksono, Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan dalam Konteks Studi Pembangunan, Jurnal, Fakultas Ekonomi, Universitas ol 1, No. 1. 2009.

a Dwipi Salam, Ananta Prathama, Peran Pemerintah Daerah Dalam angan UMKM, Jurnal Kebijakan Public, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, s Nasional Veteran Surabaya, Vol 13, No 2, 2022.

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki kiprah pada memfasilitasi UMKM buat mencapai tujuan pengembangan perjuangan yang dimiliki oleh UMKM. Bila UMKM memiliki kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator ialah menyampaikan kemampuan UMKM menggunakan aneka macam cara, contohnya dengan menyampaikan training. Demikian pula Jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator ialah membantu mencari jalan keluar supaya UMKM bisa mendapat pendanaan yang diharapkan, namun wajib dilakukan secara hati-hati supaya posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Pada konteks fasilitasi tersebut pemerintah berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri.

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tadi bisa terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memberlakukan UMKM sama menggunakan badan perjuangan lainnya, tidak ada hukum spesifik bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan



ain. Keempat, pemerintah simpati dengan melakukan training
UMKM atau dorongan motivasi proteksi terhadap UMKM di
tan hukum.

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah menjadi regulator ialah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah perjuangan UMKM dalam membuat usahanya. menjadi regulator, pemerintah berfungsi buat menjaga kondisi lingkungan perjuangan permanen aman buat melakukan investasi yang dilakukan menggunakan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan wacana aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang bisa menerapkan hukum supaya kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. pada melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan kewenangan Pemerintah Daerah. seperti halnya fungsi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah juga memiliki fungsi pengaturan terhadap rakyat yang terdapat di wilayahnya.²⁴

3. Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator merupakan zat yang ditambahkan ke pada suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. berdasarkan hal tersebut, peran Pemerintah Daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM ialah meningkatkan kecepatan proses berkembangnya UMKM menjadi fast moving enterprise. Fast moving enterprise ialah UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi



Jana Gani Putra, Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca Di Kabupaten Jombang, Jurnal, Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Vol 3, No 1, 2015.

menjadi usaha besar. untuk mencapai perkembangan fast moving enterprise, seperti halnya sebuah katalis, Pemerintah Daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut tetapi tak terlibat pada mengatur keseluruhan proses perubahannya.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan sebab keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak pada aktivitas perekonomian akan mengakibatkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi karena pasar tak bisa bergerak lagi secara alami. untuk bisa menjalankan kiprahnya menjadi katalisator, pemerintah melakukan aneka macam langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif buat produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) serta permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir (Gede Diva,2009:15-18).²⁵

2.5 Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negative. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal



Jana Gani Putra, Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca Di Kabupaten Jombang, Jurnal, Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Vol 3, No 1, 2015.

balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

1) Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak

akkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang in positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia



akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2). Pengertian dampak negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2.6 Keaslian penelitian

Penulisan penelitian dengan judul adalah Dampak UMKM Terhadap Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Jeneponto asli yang ditulis sendiri oleh peneliti berdasarkan tinjauan kepustakaan melalui buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan fakta-fakta yang

lapangan.



Setelah melakukan penelusuran dan riset, peneliti menemukan beberapa judul penelitian yang juga membahas mengenai dampak perkembangan UMKM terhadap pembangunan ekonomi daerah, namun belum ada penelitian yang membahas mengenai Dampak *Food Court* Umkm Terhadap Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Jenepono. Walaupun objek kajiannya sama-sama membahas tentang UMKM dan Pembangunan ekonomi daerah, tetapi selalu ada perbedaan batasan pembahasan dari masing-masing penelitian. Beberapa judul penelitian terdahulu yang mengandung kemiripan dan perbedaannya yaitu:

1. Nurul Hidayati, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016 Dengan Judul Skripsi Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Priode 2012-2015. Pada penelitian tersebut membahas mengenai Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bogor. Dalam substansi pembahasannya tentang Pengaruh Jumlah UMKM, Modal UMKM, Laba UMKM dan Tenaga Kerja UMKM terhadap PDRB perkapita di Kabupaten Bogor.²⁶



idayati, 2016, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Periode 2012-2015", Skripsi, Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif ah, Jakarta.

2. Rizka Aulia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021 Dengan Judul skripsi Pengaruh Pertumbuhan Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Ponorogo Periode 2013-2017. Pada penelitian tersebut membahas PDRB, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tenaga kerjaUMKM, dan pertumbuhan UMKM. Dalam substansi pembahasannya tentang pengaruh jumlah UMKM terhadap PDRB perkapita, tenaga kerja UMKM terhadap PDRB perkapita UMKM dan tenaga kerja UMKM terhadap PDRB perkapita di Kabupaten Ponorogo.²⁷



uliah, 2021, "Pengaruh Pertumbuhan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Periode 2013-2017", Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis itute Agama Islam Ponorogo.

2.7 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiono (2019) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Kerangka berpikir ini dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang ditelitinya (Riduwan, 2011).

2.7.1 Usaha *Food Court*

UMKM jenis *Food Court* merupakan inti dari penelitian ini, Usaha *Food Court* adalah sebuah bisnis yang mengelola dan menyediakan berbagai macam makanan dan minuman dalam satu lokasi atau area yang sama. *Food Court* biasanya terletak di pusat perbelanjaan, mal, terminal, bandara, kampus, atau tempat-tempat umum lainnya yang ramai dikunjungi. Ciri khas dari *Food Court* adalah adanya beberapa kios atau gerai makanan yang berbeda di dalamnya, masing-masing menawarkan jenis makanan yang berbeda pula. Pengunjung dapat memilih dan membeli makanan dari berbagai pilihan kuliner yang ada di *Food Court* sesuai dengan selera



Biasanya, *Food Court* juga menyediakan tempat duduk atau area akan bersama. Usaha *Food Court* dapat menjadi tempat yang

nyaman bagi pengunjung untuk menikmati berbagai macam masakan tanpa harus berkunjung ke beberapa tempat yang berbeda. Ini juga merupakan kesempatan bagi para pengusaha kuliner untuk menawarkan produk mereka kepada audiens yang lebih luas.

2.7.2 Peran Pemerintah Daerah

Kemudian peneliti mencari bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan atau memajukan usaha UMKM jenis *Food Court* yang ada di Jenepono, yang dimana Menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator:

- Regulator: Pemerintah bertindak sebagai regulator dengan menetapkan kebijakan, regulasi, dan standar yang mengatur berbagai aspek operasional UMKM, seperti perizinan usaha, perlindungan konsumen, pajak, dan peraturan ketenagakerjaan. Regulasi yang jelas dan konsisten membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi bagi UMKM.
- Fasilitator: Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan berbagai layanan dan dukungan bagi UMKM, seperti akses ke pembiayaan, pelatihan, konsultasi bisnis, infrastruktur yang mendukung, dan akses pasar. Fasilitasi ini membantu UMKM untuk



kembang, meningkatkan kapasitas, dan bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif.

- Katalisator: Pemerintah juga berperan sebagai katalisator dengan mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam sektor UMKM melalui kebijakan insentif, program pengembangan, dukungan riset dan pengembangan, serta memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan. Dengan menjadi katalisator, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.7.3 Dampak positif dan negatif

Kemudian peneliti mencari bagaimana dampak dari pengembangan UMKM jenis *Food Court* terhadap masyarakat dan juga pemerintah daerah. Dampak positif dan negatif adalah hasil atau konsekuensi dari suatu peristiwa, kebijakan, atau tindakan yang memberikan manfaat atau kerugian bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara umum.

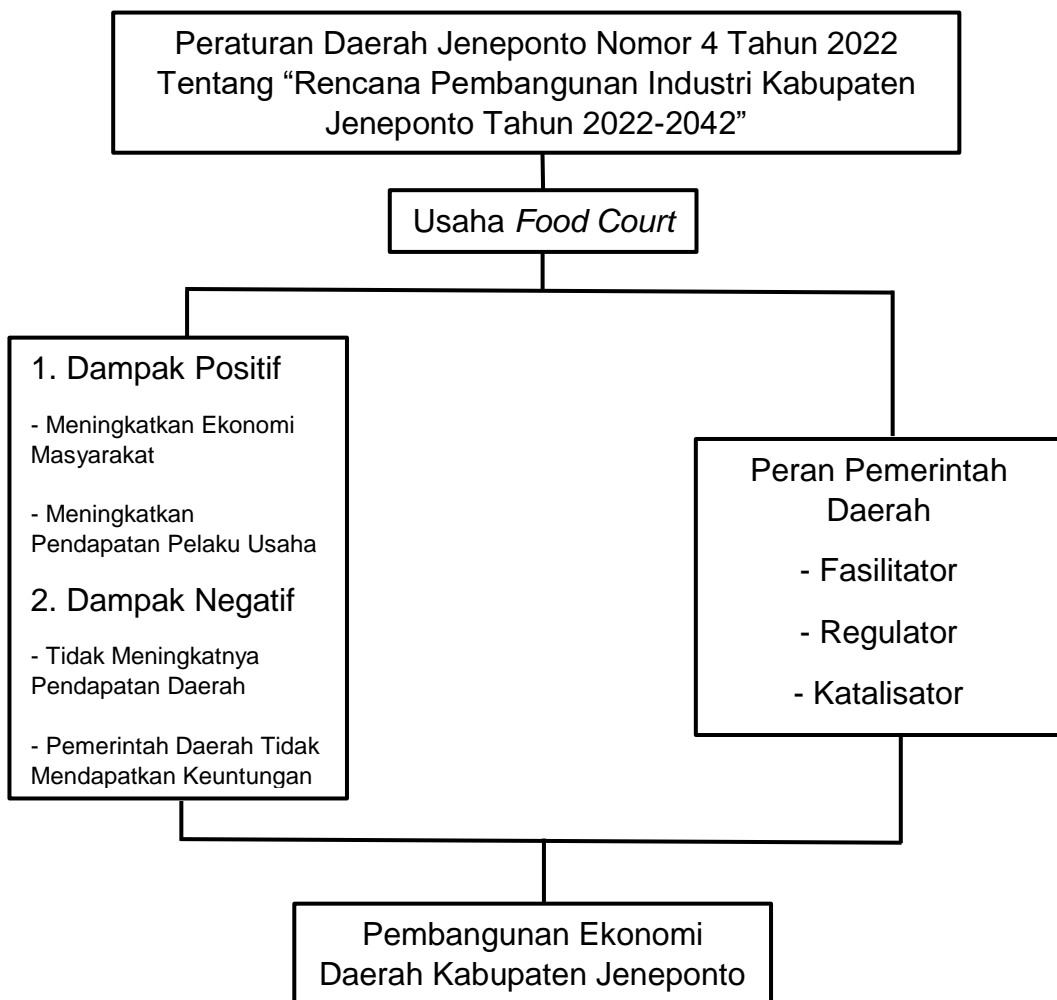
2.7.4 Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Jeneponto

Setelah pemerintah mengembangkan UMKM jenis *Food Court* ini peneliti meneliti bagaimana atau apa hasil dari pengembangan *Food Court* di kabupaten Jeneponto terhadap pembangunan ekonomi daerah Jeneponto. Pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk atkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, an lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan di suatu



wilayah atau daerah tertentu. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan memperbaiki kondisi ekonomi daerah secara keseluruhan.

Tabel 2.7 Kerangka Berfikir



Sumber: Pribadi (2023)

